

REKOMENDASI

Temu Rakyat Korban Investasi Kehutanan dan Perkebunan Besar Dialog Pembangunan Ekonomi Hijau dan Pembangunan Berkelanjutan

Pada hari ini, Jumat, Tanggal Tujuh Bulan November Tahun Dua Ribu Empat Belas, bertempat di Kesusteran Maranatha, Waena, Jayapura.

Setelah mendengar dan membahas Laporan Korban Investasi Kehutanan dan Perkebunan Besar diseluruh tanah Papua, serta mendiskusikan berbagai perkembangan kebijakan pembangunan, maka dengan ini kami perwakilan masyarakat adat dari dua belas Kabupaten dan Kota diseluruh tanah Papua, menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran dan pengabaian hak asasi manusia oleh negara terhadap pemenuhan perlindungan, penghormatan dan pemajuan atas hak-hak masyarakat adat diseluruh tanah Papua, antara lain: tindakan diskriminasi, penindasan dan perampasan hak-hak masyarakat adat diseluruh tanah Papua.

Pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana disebutkan diatas terjadi pada kurun waktu tahun 1982 sampai dengan saat ini tahun 2014, telah mengakibatkan kerugian bagi masyarakat adat, hilangnya pranata sosol budaya dan lingkungan hidup. Oleh sebab itu, kami perwakilan masyarakat adat korban investasi kehutanan dan perkebunan besar dari dua belas kabupaten/kota di tanah Papua, dengan ini menyatakan hal-hal, sebagai berikut:

1. **Kepada Presiden Republik Indonesia** untuk segera mengeluarkan moratorium (penundaan sementara) terhadap kegiatan investasi kehutanan dan perkebunan besar diseluruh tanah Papua selama 10 (sepuluh) tahun. Selama masa waktu moratorium tersebut, pemerintah melakukan penyelesaian berbagai permasalahan dan pelanggaran hak-hak masyarakat adat yang sudah terjadi, serta melakukan koreksi atas berbagai kebijakan dan peraturan yang berlaku di tanah Papua.
2. **Kepada Gubernur Provinsi Papua dan Papua Barat** untuk segera meninjau kembali semua kebijakan pemberian ijin terhadap investasi kehutanan dan perkebunan besar yang merugikan hak-hak masyarakat adat diseluruh tanah Papua.
3. **Kepada Panglima Komando Daerah Militer XVII Cenderawasih dan Kepala Kepolisian Daerah Papua** untuk segera menertibkan dan menindak oknum aparat Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polisi Republik Indonesia (Polri) yang dengan terang-terangan ikut melakukan tekanan dan intimidasi terhadap masyarakat adat diseluruh tanah Papua yang ingin mempertahankan hak-haknya. Serta memberikan sanksi terhadap aparat keamanan TNI dan Polri yang membekingi, melindungi dan terlibat sebagai pelaku usaha bisnis pemanfaatan hasil hutan yang tidak legal.
4. **Kepada Bupati/ Walikota diseluruh tanah Papua** untuk segera menghentikan kebijakan pemberian Izin dan Rekomendasi usaha di bidang investasi kehutanan dan perkebunan besar tanpa syarat.
5. **Kepada Yang Mulia Anggota Majelis Rakyat Papua dan Papua Barat** untuk segera melakukan Dialog Khusus dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, guna perubahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kebijakan investasi kehutanan dan perkebunan besar yang sedang dan akan berlangsung di tanah Papua yang berdasarkan hak-hak masyarakat adat, berdasarkan semangat dan jiwa Otonomi Khusus Papua.

6. **Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua dan Papua Barat** untuk segera membentuk Panitia Khusus guna melakukan penyelidikan terhadap indikasi pelanggaran hak asasi manusia bagi masyarakat adat di tanah Papua yang diakibatkan dari adanya kebijakan dan kegiatan investasi kehutanan dan perkebunan besar.
7. **Kepada Dewan Adat Suku diseluruh tanah Papua** untuk segera melakukan rekonsiliasi dan musyawarah adat di masing-masing wilayah guna melakukan pemetaan tanah adat di masing-masing suku dan menindaklanjuti hasil Temu Rakyat Korban Investasi Kehutanan dan Perkebunan Besar.
8. **Kepada setiap masyarakat adat di Papua** untuk aktif mengambil bagian membuat laporan tentang pelanggaran hak asasi manusia dan lingkungan yang disampaikan kepada masyarakat luas dan lembaga-lembaga yang bergerak dalam upaya perlindungan, penghormatan dan pemajuan hak asasi manusia di tingkat Papua, Nasional dan Internasional.
9. **Peserta Temu Rakyat Korban Investasi Kehutanan dan Perkebunan Besar, Dialog Pembangunan Ekonomi Hijau dan Pembangunan Berkelanjutan** mendeklarasikan terbentuknya Dewan Lingkungan Masyarakat Adat di Tanah Papua.

Demikian Rekomendasi ini dibuat dan disepakati bersama untuk diperhatikan dan dilaksanakan. Semoga leluhur kami dan sang pencipta menyertai kita semua.

Tim Perumus Naskah Rekomendasi:

1. Edi Ohoiwutun
2. Dominicus Mitoro, SE, MSi
3. Yohanes Akwan, SH
4. Frans Kalawen
5. Muscory Kainakaimu
6. Simon Banundi, SH
7. Pdt. Victor Runggeari, S.Si Teologi
8. Aironia A. Berotabui

DAFTAR PESERTA

Temu Rakyat Korban Investasi Kehutanan dan Perkebunan Besar Dialog Pembangunan Ekonomi Hijau dan Pembangunan Berkelanjutan Kesusteran Maranatha, Waena, Jayapura, 4 – 7 November 2014.

1. Yohanes Akwam, Teluk Bintuni (HP. 0852 5456 2446)
2. Paulinus N Balagaize, Kpg. Onggari, Malind, Merauke (HP. 0853 4456 7690)
3. Muscory Kainakaimu, Keppi - Mappi, (HP. 0823 9846 8618)
4. Elisabet Ndiwaen, Merauke (HP. 0823 9976 8113)
5. Severinus Dau, SVD, Vivat Internasional, Sorong (HP. 0812 2369 977)
6. Yulianus Kowela, YPLHPMSP, Serui, (HP. 0823 9833 2270)
7. Charles Tawaru, Greenpeace Indonesia, Abepura (HP. 0812 47 95 9331)
8. Petrus Ndiwaen, Merauke (HP. 0823 9901 7666)
9. Johan Kudiai, Nduga, Intan Jaya (HP. 0812 4864 0422)
10. Bernadus Gilik, Kpg. Malalilis, Sorong (HP. 0821 9902 3917)
11. Yohanes Bewangkir, Kpg. Kriko, Arso Timur, Keerom (HP. 0823 9828 6846)
12. Ridha Saleh, Jakarta (HP. 0813 1562 8072)
13. Simon P. Hanebora, Ka. Suku Yerisiam, Nabire (HP. 0812 4004 0955)
14. Yorgen Numbery, Komnas HAM Papua, (HP. 0853 4414 5506)
15. Yustinus M, Suku Arfak, Manokwari (HP. 0823 9770 9977)
16. Nikzon Kasi, Suku Arfak, Manokwari (HP. 0852 3182 7317)
17. Roni Berotabui, JPIC GKI, Jayapura (HP. 0813 9225 5307)
18. Damasus Kebelen, Arso – Keerom (HP. 0812 4065 0000)
19. Servo T, Keerom (HP. 0853 4343 3444)
20. Herman Fatagur, Arso – Keerom (HP. 0813 5412 809)
21. Markus Homer, Jaksiro, Sorsel (HP. 0812 4818 4265)
22. Frans Kalawen, Salawati, Sorong (HP. 0821 9890 8348)
23. Albertus, SKPKC – FP, Sentani (HP. 0823 9926 2695)
24. Agustinus Kalalu, Klayili, Sorong (HP. 0813 7774 9966)
25. Steve Marani, Wasior, Kab. Teluk Wondama (HP. 0852 4384 6755)
26. Pietsaw Amafnini, JASOIL, Kab. Manokwari, (HP. 0813 4443 5008)
27. Amos Sumbung, Greenpeace, Manokwari (HP. 0811 486 327)
28. Frans Abar, Arso – Keerom
29. Adam Rariaro, Sorong, (HP. 0852 4423 9934)
30. Ottow Wanma, Belantara Papua, Sorong (HP. 0813 4466 3763)
31. Marselus Poma, Jair, Boven Digoel
32. Oktovianus Wakem, SKP KAME, Merauke (HP. 0822 4802 1318)
33. Donatus Mahuze, Muting, Merauke (HP. 0821 9786 4204)
34. Tinus Keikyera, Yahukimo (HP. 0821 8983 871)
35. Charles Imbir, Raja Ampat (HP. 0823 9734 0800)
36. Yunus Sarumi, Wondiboi, Wasior (HP. 0822 3893 8988)
37. Frans Saba, Manopi, Wasior (HP. 0823 9730 8454)
38. Jony Refideso, Suku Kuri, Bintuni (HP. 0822 3832 1751)
39. Yance Maniburi, Yerisiam, Nabire
40. Herry Kopouw, ALDP, Abepura (HP. 0822 3890 0374)
41. Fredrik H.A. Wanda, FPPNG, Jayapura (HP. 0822 3855 3989)
42. Eddy Ohoiwutun, LMA Port Numbery, Jayapura

43. Arif, KONTRAS, Jakarta (HP. 0815 1319 0363)
44. Moh. Islah, WALHI, Jakarta (HP. 0818 0889 3713)
45. Kostan Magablo, AMAN Sorong Raya, Sorong (HP. 0812 4737 9090)
46. Luksen Krimadi, Knasaimos, Sorong Selatan (HP.)
47. Dominicus Mitoro, LEMASKO, Timika (HP. 0822 1888 1112)
48. Neles, SKPKC – FP, Sentani
49. Wahyu, ELSAM, Jakarta (HP. 0858 8273 1262)
50. Ari, ELSAM, Jakarta
51. Syamsul Alam, YSK, Jakarta (HP. 0813 8288 9103)
52. Dede Shineba, KPA, Jakarta (HP. 0813 6863 3608)
53. Pdt. Victor Runggeari, S.Si Teologia, Lereh, Jayapura (HP. 0812 4835 0547)
54. Bata Rumaropen, JERAT Papua, Abepura (HP. 0813 4457 6984)
55. Sirzet Gwasgwa, DAP Mbahamatta, Fakfak (HP. 0822 3833 8191)
56. Pius Oktavianus, Bentara Papua, Manokwari (HP.)
57. Simon Banundi, LP3BH, Manokwari (HP. 0821 9907 9829)
58. Abner Mansai, FOKER LSM Papua, Abepura (HP. 0811 481 566)
59. Paskhal Mendewen, DAMAR, (HP. 0822 6111 1377)
60. Esau Yaung, Yayasan Paradisea, Manokwari (HP. 0812 4816 2018)
61. Laurens Womsiwor, Greenpeace, Abepura (HP. 0823 9940 2121)
62. Daniel Bairam, PTPPMA, Abepura (HP. 0852 5466 3199)
63. Pst. John Jonga, Yay. Teratai Hati, Wamena (HP. 0812 4878 7338)
64. Marianus Maknaipeku, LMA Mimika (HP. 0812 4015 3332)
65. Saul Wanimbo, SKP Timika (HP. 0812 8481 1811)
66. Y.L. Franky, PUSAKA, Jakarta (HP. 0813 1728 6019)
67. Bartol Kuba, Dekai, Yahokimo (HP. 0853 4408 6477)
68. Peneas Lokbere, BUK/KONTRAS Papua (HP. 0822 9263 1836)
69. Amos Soulimena, Sentani, (HP. 0812 4826 3822)
70. Vallen Baransano, Jayapura.